

**Awasi Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kulon Progo
Temukan 5 Kendala di TPS**

Kulon Progo – Bawaslu Kabupaten Kulon Progo lakukan monitoring pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Rabu, 27 November 2024. Pengawasan dilakukan tersebar di 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo di beberapa TPS. Fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menasar TPS rawan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang sebelumnya telah dipetakan. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajaran pengawas adhoc se-Kabupaten Kulon Progo ditemukan setidaknya ada 4 kendala yang terjadi di TPS. Permasalahan yang ada di TPS sebagai berikut :

1. TPS yang mengalami kekurangan surat suara sebanyak 1 TPS
2. TPS yang mengalami kelebihan surat suara sebanyak 11 TPS
3. TPS yang mengalami tertukar logistik sebanyak 1 TPS
4. TPS yang kurang ramah disabilitas sebanyak 4 TPS
5. Pengawas TPS yang tidak dapat menjalankan tugas pengawasan di TPS

Rincian kendala yang ditemukan sebagai berikut :

No	Kendala	Kelurahan/ Kalurahan, Kapanewon	Nomor TPS	Keterangan
1.	TPS yang mengalami kekurangan surat suara	Demangrejo, Sentolo	004	Kekurangan 20 surat suara
2.	TPS yang mengalami kelebihan surat suara	Giripeni, Wates	003	Kelebihan 20 surat suara
		Wates, Wates	005	Kelebihan 1 surat suara
		Sendangsari, Pengasih	009	Kelebihan 2 surat suara
		Kalirejo, Kokap	004	Kelebihan 20 surat suara
		Pendoworejo, Girimulyo	006	Kelebihan 1 surat suara
		Purwosari, Girimulyo	002	Kelebihan 2 surat suara
		Donomulyo, Nanggulan	003	Kelebihan 1 surat suara

No	Kendala	Kelurahan/ Kalurahan, Kapanewon	Nomor TPS	Keterangan
		Gerbosari, Samigaluh	003	Kelebihan 1 surat suara
		Ngargosari, Samigaluh	003	Kelebihan 1 surat suara
		Pagerharjo, Samigaluh	007	Kelebihan 1 surat suara
		Banjaroyo, Kalibawang	001	Kelebihan 2 surat suara
3.	TPS yang mengalami tertukar logistik	Srikayangan, Sentolo	008 dan 009	Kotak suara antara TPS 008 dan 009 tertukar
4.	TPS yang kurang ramah disabilitas	Banjarharjo, Kalibawang	001	TPS berundak
		Gotakan, Panjatan	001	TPS berundak
		Sendangsari, Pengasih	012	TPS berundak
		Wates, Wates	002	TPS berundak
5.	PTPS yang tidak dapat menjalankan tugas pengawasan di TPS	Bendungan, Wates	009	PTPS kecelakaan
		Demangrejo, Sentolo	005	PTPS sakit

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kendala tersebut, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo beserta jajaran pengawas adhoc melakukan langkah sebagai berikut :

1. Dalam kondisi kekurangan dan kelebihan surat suara, PTPS langsung melakukan komunikasi dengan KPPS, PPS dan PPK untuk mencatatkan kejadian
2. Dalam kondisi TPS yang mengalami kotak suara yang tertukar, PTPS beserta KPPS dan satuan pengamanan melakukan koordinasi dengan PPS dan langsung menukarkan kotak suara yang tertukar tersebut.
3. Dalam kondisi TPS yang tidak aksesibel, PTPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk diberikan fasilitas yang layak kepada pemilih disabilitas.
4. Dalam kondisi PTPS yang tidak dapat menjalankan tugas pengawasan di TPS karena mengalami kecelakaan dan sakit, langsung ditindaklanjuti dengan menggantikan tugas PTPS tersebut kepada PKD untuk dilakukan pengawasan.

Tindak lanjut yang cepat dilakukan oleh pengawas di wilayah Kulon Progo, membuat adanya kendala tersebut tidak mengarah pada pelanggaran. Sejauh ini, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo yang tersebar di 12 Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo berjalan lancar, aman, dan tidak ditemukan pelanggaran.

Pasca pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo aktif melakukan koordinasi bersama jajaran pengawas Panwaslu Kecamatan (Panwascam) untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selain itu, adanya komunikasi antara Bawaslu Kulon Progo dan Panwascam berguna untuk memetakan adanya potensi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS.

Minimnya kendala pada saat pemungutan dan penghitungan ini tidak terlepas dari peran serta seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS.